



Jogja Bypass

Penguatan Bantuan Hukum untuk Warga Kurang Mampu

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta menjalin sinergi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di wilayahnya, untuk memberikan bantuan hukum bagi warga masyarakat rentan dan kurang mampu.

Koordinator OBH se-DIY, Mochamad Iqbal, mengatakan, berdasar undang-undang bantuan hukum, OBH mendapat mandat untuk kepentingan tersebut. Dijelaskannya, di DIY sendiri, terdapat 22 OBH yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

"Kita konsennya memang orang yang betul-betul nggak mampu, yang punya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) serta kelompok rentan," katanya, Jumat (25/2).

Oleh sebab itu, pihaknya pun menyam-

but baik sinergitas dengan Pemkot Yogyakarta ini, guna meningkatkan layanan dan kesadaran hukum masyarakat. Menurutnya, kerja sama tersebut, dibarengi juga dengan kurcuan anggaran yang dialokasikan pemerintah setempat melalui APBD

"Kalau dari Kota Yogya, kita dapat anggaran Rp8 juta yang litigasi dan Rp4 juta yang non litigasi. Selama ini kasus yang kita tangani bermacam-macam, baik pidana atau perdata, sejak 2014 kita lakukan pendampingan," cetusnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, peran serta LBH sangatlah signifikan dalam menyukseskan program pemerintah untuk memberi keadilan bagi setiap individu, terutama bagi masyarakat tidak mampu. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005